

JURNAL HI

Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Itsnaini Permata Hati

[ALASAN TURKI SEPAKAT DI BAWAH PEMERINTAHAN ERDOGAN BEKERJA SAMA DENGAN UNI EROPA DALAM PENANGANAN IMIGRAN]

Sebuah penelitian mengenai alasan Turki pada masa pemerintahan Erdogan sepakat untuk bekerja sama dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran yang diresmikan pada Maret 2016

ALASAN TURKI DI BAWAH PEMERINTAHAN ERDOGAN SEPAKAT BEKERJA SAMA DENGAN UNI EROPA DALAM PENANGANAN IMIGRAN

*(The Reason of Turkey under Erdogan Government to Approve the European Union
Collaboration in Handling the Immigrants)*

Itsnaini Permata Hati

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia 55183

itsnainipermata@gmail.com

ABSTRACT

Collaboration between Turkey and European Union in handling immigrants became a controversial cooperation for Turkey under Erdogan government. Erdogan based who are leader that makes Turkey's foreign policy Islam oriented. When Syria conflict exploded in 2011, Syrian came out from their countries and became refugee in Middle East and European Union Countries. Turkey welcomed Syrian refugees with Open Door Diplomacy. This study will explain why Turkey under Erdogan Government approved the European Union collaboration in handling the immigrant using the model of rational actor in order to calculate the benefit from the collaboration. The preliminary results of the research show that Turkey approved the collaboration because Turkey wanted European Union actualize three points in that cooperation. First, Turkey will take benefit from European Union to re-energise the accession process for full membership Turkey in European Union. Second, Turkey will take a benefit from the fulfilment of the visa liberalisation roadmap will be accelerated by European Union for Turkish citizen. Third, Turkey will take a benefit from the point that The EU and its Member States will work with Turkey in any joint endeavour to improve humanitarian conditions inside Syria, in particular in certain areas near the Turkish border.

Keywords: *EU-Turkey Cooperation, Turkey, European Union, Migrants, Middle East*

Pendahuluan

Turki pada masa Mustafa Kemal Atatürk tahun 1923 ingin melepaskan segala hal yang berhubungan dengan unsur Islam di Turki. Mustafa Kemal Atatürk membuang semua unsur di Era Ottoman, kecuali beberapa unsur kemegahan masa lalu, dan memperbaharunya dengan Westernisasi dan sekularisme. Pada dekade pertama setelah berdirinya republik, Kemalis melakukan serangkaian reformasi yang memutuskan hubungan Turki dengan masa lalu Islam dan untuk dunia Islam secara lebih luas. Kekhalifahan yang dipimpin oleh pemimpin spiritual dunia Muslim Sunni dihapuskan. Abjad Latin (dimodifikasi untuk mengakomodasi suara Turki) diperkenalkan menggantikan tulisan Arab, dan usaha dibuat untuk membersihkan bahasa Turki kata-kata dari bahasa Arab. Kemal juga mengganti agar jas daripada pakaian tradisional. Semua lembaga keagamaan dan sumber daya dibawa di bawah kendali negara (Rabasa, 2008).

Pada masa sebelum Erdogan, perjalinan mitra antara Negara Turki dan Uni Eropa secara resmi terjadi pada tahun 1959. Pada saat itu, Turki mengajukan diri menjadi anggota dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Community/EEC*) (Chronology of Turkey – European Union Relations (1959-2015),

2015). Lalu Perjanjian Ankara yang ditandatangani dengan EEC pada 12 September 1963 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1964. Perjanjian Ankara juga secara eksplisit ditentukan bahwa kemitraan rezim yang dibentuk akan memfasilitasi masuknya Turki ke Uni Eropa. Ada pula perjanjian Turki dengan *The Customs Union*, yang merupakan tahap penting dari integrasi Turki dengan Uni Eropa, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996 (Turkey-EU Relations). Selama ini, hubungan antara Turki dan Uni Eropa selalu baik. Hanya mengenai masalah keanggotaan Uni Eropa saja yang menjadi ganjalan hubungan antara Turki – Uni Eropa. Pun keanggotaan Turki dalam NATO yang sampai sekarang masih terbilang baik dan Turki juga berkontribusi banyak di NATO.

Pada saat Erdogan mulai menjabat di tahun 2003, Erdogan mulai menerapkan kebijakan *zero problem neighbor* yang pro ke Timur Tengah. Turki mengalami berbagai perkembangan hubungan diplomatis dengan negara-negara yang sebelumnya bersengketa dengan Turki yakni dengan negara Timur Tengah. Beberapa diantaranya antara lain adalah, normalisasi hubungan diplomatis dengan Iraq yang sebelumnya mengalami pembekuan akibat adanya KRG (*Kurdistan Regional Government*) di wilayah Iraq

akibat adanya keterkaitan langsung dengan gerakan gerilya suku Kurdi di wilayah Turki. Hubungan diplomatis dengan Syria yang telah bersitegang semenjak peristiwa aneksasi provinsi *Hatay* ke dalam wilayah Turki serta keterlibatan pemerintah Syria dalam mendukung gerakan separatis suku Kurdi oleh partai PKK.

Namun serangkaian perkembangan positif tersebut di sisi lain tidak diikuti dengan perkembangan yang terjadi dalam negosiasi keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa. Negosiasi yang berjalan semenjak tahun 2004 tersebut mengalami stagnasi, dari 35 poin *Acquis Communautaire*, yang diajukan hanya satu bab yang telah disetujui dan dianggap telah memadai yaitu dalam bab kebijakan industri dan firma perusahaan. Sedangkan 31 bab yang lain masih dinegosiasikan dengan 17 diantaranya telah dibekukan untuk waktu yang belum ditentukan (Putra, 2013).

Pada saat perang Suriah pecah pada tahun 2011, Turki menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan para warga sipil Suriah untuk mengungsi dari negaranya. Akibat letaknya yang berbatasan dengan Suriah, Turki merasakan dampak langsung dari adanya Perang Saudara yang masih terjadi di Suriah. Serangkaian bentrokan sengit yang terjadi antara pasukan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad

dengan kubu pemberontak berlangsung dekat Kota Aleppo bagian utara Suriah. Akibat pertempuran itu, ribuan pengungsi melarikan diri ke perbatasan Suriah-Turki. Turki merupakan pintu pertama bagi para pengungsi dari Suriah yang mencari aman dari perang di negara mereka (Bentrokan sengit di Suriah, ribuan pengungsi berkumpul dekat Turki, 2016)

Untuk menghadapi pengungsi yang melarikan diri ke Turki, pada Maret 2011 Turki menerapkan kebijakan *Open Door Policy* dalam menangani pengungsi dari Suriah (Turkish PM says open door policy for refugees will continue). Melalui kebijakan ini, Turki mengambil sikap untuk tidak menolak atau mengusir para pengungsi asal Suriah karena lari dari peperangan. Tidak hanya menampung, pemerintah Turki juga memberikan mereka kesempatan untuk dapat membaur dan bekerja di negara tersebut (Armandhanu, 2015). Menteri Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial Turki, Ahmet Erdem mengatakan, Turki telah mengantisipasi segala dampak buruk yang mungkin timbul, salah satunya tingginya angka pengangguran. Karena itulah Turki memberikan kesempatan kerja bagi warga Suriah yang memasuki negara itu dengan izin. Bagi kelompok pengungsi yang memasuki Turki dengan dokumen lengkap seperti paspor dan mendaftarkan dirinya,

diberikan izin kerja di Turki dan memulai usaha sendiri. Namun bagi pengungsi yang masuk secara ilegal akan ditampung di kamp pengungsi di dekat perbatasan, diberikan nomor pengungsi, dan pelatihan agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Turki telah meningkatkan kemampuan dalam mengatasi pengangguran, salah satunya dengan memberikan insentif dan subsidi bagi pengungsi yang ingin mencari kerja. Hal ini diharapkan dapat meredam kecemburuan sosial dalam masyarakat Turki terhadap warga pengungsi yang bekerja (Armandhanu, 2015) Ini merupakan alasan Kebanyakan pengungsi melarikan diri ke arah Turki karena perlakuan Turki kepada para pengungsi korban perang disebut lebih baik dibandingkan negara-negara sekitar yang lain. Kebijakan *Open Door Policy* inilah yang tidak dimiliki negara lain di sekitar Suriah seperti Israel, Kuwait, dan Arab Saudi (Nugraha, 2015).

Sejak Oktober 2013, jumlah pengungsi Suriah telah meningkat lebih dari tiga kali lipat angka dan sekarang hampir dua juta pengungsi yang terdaftar. Sejumlah besar orang Kurdi juga telah melarikan diri ke Turki sebagai akibat dari serangan ISIS di kota Suriah utara Ayn al-Arab. Hanya 10 persen dari pengungsi tinggal di kamp-kamp yang dikelola pemerintah, mayoritas hidup tersebar di antara kota-kota di

sepanjang perbatasan Suriah, meskipun pengungsi dapat ditemukan di seluruh negeri (Armandhanu, 2015). Turki telah membangun 26 kamp pengungsian sementara sebagai bagian dari kebijakan *Open Door Diplomacy* untuk menerima pengungsi yang mereka sebut sebagai “saudara kami dari Suriah”. Menurut data yang diperoleh *Anadolu Agency* dari Badan Manajemen Bencana dan Kedaruratan Turki (AFAD), Turki telah menghabiskan hampir 9 milyar dollar US kepada pengungsi Suriah sementara organisasi bantuan internasional termasuk PBB menghabiskan sekitar 455 Juta dollar US. Bantuan ini masih kurang dibandingkan dengan yang sudah dikeluarkan pemerintah Turki untuk pengungsi (Administrator, 2016).

Sekitar 135.000 warga Suriah telah terdaftar di Badan Pengungsi PBB (UNHCR) di Mesir. Perkiraan oleh UNHCR dan organisasi kemanusiaan lainnya menunjukkan bahwa populasi pengungsi Suriah di negara itu bisa menjadi dua kali angka itu. Pengungsi tinggal di seluruh Lebanon di lebih dari 1.700 daerah. Banyak pengungsi yang tinggal di daerah yang miskin di Libanon. Awalnya, para pengungsi Suriah yang tiba di Mesir disambut hangat. Hubungan sejarah antara kedua negara telah menciptakan rasa solidaritas antara Suriah dan Mesir.

organisasi bantuan Mesir baru bermunculan untuk menawarkan bantuan kepada para pengungsi, dan secara umum ada tingkat tinggi kepedulian terhadap kesejahteraan para pendatang baru. Salah satu orang di Kairo mengatakan dengan revolusi mereka sendiri masih segar dalam pikiran mereka.

Permasalahan mengenai membludaknya imigran juga dialami oleh negara Timur Tengah yang lain. Namun, kehadiran mereka juga tidak begitu layak, walaupun UNHCR ikut menanganinya. Begitu pula di Uni Eropa. Ini disebabkan imigran yang berada di Turki banyak yang mengadu nasibnya ke Uni Eropa yang diyakini memberikan kesempatan hidup lebih baik dibanding Turki. (Nugraha, 2015). Namun sambutan di berbagai negara Eropa tidak semuanya ramah, beberapa menolak. (AP/AFP/MYR, 2016) Ada kekhawatiran di masyarakat Eropa bahwa kehadiran para pengungsi akan menimbulkan permasalahan sosial di negara mereka. (Uni Eropa dan Turki teken kesepakatan bendung imigran, 2015). Hingga akhirnya diadakan Konferensi Brussel tanggal 7 Maret 2016 untuk menangani krisis pengungsi dihadiri 28 negara termasuk Turki (Wesel, 2016). Menurut Komisaris Uni Eropa untuk urusan imigrasi, Dimitris Avramopoulos, kerja sama dengan Turki adalah tema kunci – sebuah kalimat yang bisa menjadi moto

untuk pertemuan kali ini. Namun, Turki tidak langsung mau menyepakati kesepakatan dengan Uni Eropa. Salah satu alasannya karena kompensasi yang dijanjikan Uni Eropa terlalu rendah yakni sebanyak 2,7 miliar pounsterling (Kesepakatan Uni Eropa dan Turki soal migran resmi berlaku, 2016), padahal Turki sudah menghabiskan 7.3 miliar poundsterling (Administrator, 2016).

Meskipun begitu, kesepakatan Turki dan Uni Eropa mengenai penanganan imigran Suriah akhirnya mencapai tahap akhir pada 20 Maret 2016 (Dema, 2016). Turki pada masa Erdogan sangat kental dengan kebijakan yang lebih ke arah Islam di negara-negara Timur Tengah, justru lebih berniat untuk bekerja sama menangani imigran dengan Uni Eropa.

Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan alasan Turki di bawah pemerintahan Erdogan menyepakati penanganan imigran dengan Uni Eropa, maka saya akan menggunakan Model Aktor Rasional

Di model ini, Graham T. Allison menjabarkan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu

tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku yang bernalar dan terkoordinasi. (Mas'ood, 1994). Politik luar negeri bisa diartikan sebagai tindakan rasional (aktor rasional) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, dapat pula sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa. (Warsito, 1998, p. 73)

Para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan alternatif-alternatifnya dengan menggunakan “optimalisasi hasil”. Ini dimaksudkan bahwa para pembuat keputusan memiliki informasi yang cukup banyak sehingga optimal dalam melakukan penelusuran dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Allison mengungkapkan bahwa model ini paling sering digunakan untuk menjelaskan politik luar negeri. Model ini juga ingin menunjukkan bahwa jika kita ingin mencoba mengetahui apa kira-kira kebijakan negara lain, kita harus menempatkan diri kita di posisi mereka. (Mas'ood, 1994). Meyakini bahwa kebijakan pemerintah negara lain dibuat karena memang ada suatu kejadian penting dan dipertimbangkan secara rasional.

Dalam mengimplementasikan “optimalisasi hasil” tersebut, pemerintah dalam menentukan kebijakan luar negeri menggunakan cara dengan mempertimbangkan untung rugi dari masing-masing alternatif kebijakan yang akan diambil. Pertimbangan ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Opsi	Keuntungan	Kerugian
1. Alternatif A	Ada	Ada
2. Alternatif B	Ada	Ada
3. Alternatif C	Ada	Ada

Sumber : Graham T. Alison, “*The Essence Of Decision*”, dikutip dari diktat perkuliahan Teori Hubungan Internasional, Nur Azizah, Fisipol-UMY, 2005.

Menurut model yang dijelaskan Graham T. Allison bahwa Turki pasti sudah mempertimbangkan untung ruginya dalam kebijakan luar negerinya memilih sepakat bekerja sama dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran dengan Uni Eropa. Kepentingan Turki menerima kerja sama penanganan imigran dengan Uni Eropa karena mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan yang didapat Turki adalah Mendapatkan peluang lebih untuk dipertimbangkan menjadi anggota Uni Eropa, akses untuk keuntungan ekonomi dengan fasilitas perjalanan tanpa visa (mendapatkan visa Schengen) ke Uni Eropa

dan bantuan perbaikan kondisi perbatasan Turki – Suriah.

Pembahasan

Dalam *website* resmi pemerintah Turki, pemerintah Turki menuliskan bahwa tujuan strategis Turki adalah menjadi anggota Uni Eropa.

Mulai dari Turki yang mendaftarkan diri dalam kandidat calon anggota Uni Eropa pada 14 Maret 1987 hingga sekarang seperti tidak menemukan titik temu. Berbagai persyaratan makin menambah daftar semakin bertambah saja ketentuan yang diberikan Dewan Uni Eropa. Sampai sekarang Turki memang masih terus mengajukan proposal sebagai anggota Uni Eropa yang dalam jajak pendapat disetujui sekitar 80% rakyat Turki (Soekanto, 2016).

Pemerintah Turki juga menegaskan bahwa persetujuan ini sangat penting karena antara Turki dan Uni Eropa menyepakati sebuah perjanjian bersama. Ini juga berarti bahwa Turki dan Uni Eropa memiliki nasib yang sama, tantangan yang sama dan masa depan yang sama (EDT, EU, Turkey seal deal to return migrants, but is it legal? Or doable?, 2016).

Dalam pernyataan *Council of the European Union* pada 18 Maret 2016, ditegaskan bahwa Uni Eropa dan Turki akan melakukan peningkatan dalam

hubungannya dengan Uni Bea Cukai, dan peningkatan komitmen mereka kembali pada proses aksesinya sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan bersama mereka 29 November 2015. Mereka menyambut pembukaan Bab 17 pada tanggal 14 Desember 2015 dan memutuskan, sebagai langkah berikutnya, untuk membuka Bab 33 mengenai *Financial and budgetary provisions* saat pemerintahan Belanda di Uni Eropa. Persiapan pekerjaan untuk pembukaan bab lainnya akan terus dengan dipercepat tanpa mengurangi posisi Negara Anggota sesuai dengan aturan yang ada (Relations, 2016).

Sampai sekarang, Turki sudah membuka 16 bab dengan 1 bab yang sudah ditutup. Sehingga, upaya Turki dalam membawa persyaratan untuk membicarakan lagi keanggotaan Uni Eropa dalam kerja sama penanganan imigran dengan Uni Eropa adalah suatu tindakan yang rasional. Hal ini untuk menekan kembali bahwa Turki sudah melakukan berbagai upaya untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak dahulu. Dengan menyertakan isu untuk membicarakan lagi keanggotaan Turki dalam Uni Eropa, ini akan menjadi *concern* Uni Eropa dan *me-refresh* kembali tindakan terpenting Uni Eropa jika bekerja sama dengan Turki mengenai imigran.

Lalu, mengenai persyaratan visa untuk warga negara Turki sebenarnya telah ada sejak tahun 1980. Para pelamar visa Schengen menggambarkan proses mendapatkan visa sebagai hal yang rumit dan sangat mahal. Sehingga, ketika warga Turki mendengar mengenai kesepakatan antara Uni Eropa dan Ankara mereka menyambutnya dengan senang. Hal ini dikarenakan mereka bisa berharap pada akhir Juni, mereka dapat memasuki negara-negara anggota Schengen tanpa harus mengajukan permohonan visa.

Davutoglu melakukan perjanjian dengan Uni Eropa dalam imigran ini dibatasi pada kondisi tertentu. Pembatasan ini berarti bahwa kekhawatiran warga Turki mendorong ke pasar tenaga kerja Uni Eropa berbondong-bondong atau membebani sistem sosial itu tidak berdasar. Hal ini ditegaskan oleh Gökay Sofuoglu, ketua Komunitas Turki di Jerman, yang menambahkan bahwa Jerman tidak menarik dalam artian bahwa Turki saat ini menawarkan banyak perspektif ekonomi (Shtrauchler, 2016).

Turki sudah terintegrasi ekonominya dengan pasar Eropa dan selaras pasar domestik dengan aturan perdagangan internasional dan peraturan dengan bantuan Keputusan Uni Bea yang mulai berlaku pada tahun 1996. Bea Cukai Uni dengan Uni Eropa telah memberikan kontribusi

signifikan terhadap peningkatan volume perdagangan Turki, dan memberikan kesempatan bagi produsen untuk mencapai pasar berkembang dan konsumen dengan pendapatan tingkat tinggi (Questions). Ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi produsen Turki untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih mudah ke negara-negara Uni Eropa. Upaya ini adalah sesuatu yang normal diupayakan sebuah negara seperti Turki karena hubungannya dengan Uni Eropa yang sudah sejak lama.

Turki ingin agar warganya memiliki hak yang sama sebagai warga negara lain di tepi Eropa. Orang-orang di Turki semakin sulit bepergian dengan mudah dalam Uni Eropa dalam abad kuartal terakhir. Pembatasan tak hanya mempengaruhi pelancong bisnis, keluarga, namun juga mahasiswa, dan para pejabat, memperkuat perasaan mendalam kerenggangan psikologis antara Turki dan Eropa dan kadang-kadang menyebabkan tragedi pribadi seperti misalnya ketika proses visa rumit berarti menunda dari melihat seorang kerabat yang mungkin sedang sakit dan berada di Eropa. Hal ini sebenarnya tidak menjadi perpolitikan yang sulit di negara Eropa lain yang tidak masuk dalam grup Schengen. Namun untuk Turki, visa ini seperti negosiasi yang sulit untuk dicapai (Barchard, 2016).

Efek domino juga akan berlaku ketika visa Schengen ini berjalan. Pemberian izin untuk visa Schengen bagi warga Turki bisa berdampak pada perekonomian Turki yang nantinya akan meningkat dan menuju ke arah kemakmuran negara. Sebagai sebuah negara, Turki termasuk negara yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Ini bisa ditunjukkan melalui data dari GNI (*Gross National Income*), dan GDP (*Gross Domestic Product*) Turki.

Selama ini, Turki melakukan investasi terbesarnya pada Uni Eropa. Jika visa Schengen ini benar-benar dipenuhi oleh Uni Eropa. Maka angin segar untuk investasi yang lebih besar akan terbuka lebar. Pebisnis dan pelaku ekonomi akan mudah untuk bepergian ke negara-negara Uni Eropa dan melakukan lebih banyak transaksi bisnis.

Data investasi langsung Turki ke negara-negara Uni Eropa ini menunjukkan pada periode 2002-2015 Turki melakukan investasi langsung terbanyak di Negara Belanda. Dengan nantinya Uni Eropa setuju memberikan akses visa Schengen maka investasi ke negara Uni Eropa yang lain juga akan terbuka. Misalnya dengan Austria yang GNI per kapitanya sekitar 47,120 USD pada tahun 2015 (Bank, 2016).

Uni Eropa juga menempati peringkat pertama destinasi Turki dalam kegiatan ekspor barang dan jasa Turki.

Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui, tak hanya menuntaskan masalah birokrasi terhadap pengajuan visa Schengen di Turki, namun juga mendapatkan keuntungan ekonomi terlihat dari tingginya peran Uni Eropa dalam menyumbang perekonomian Turki. Inilah salah satu alasan mengapa Turki sepakat untuk kerja sama dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran pada Maret 2016 .

Setelah perang saudara di Suriah pecah, para warga sipil Suriah berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah menjadi salah satu negara destinasi para warga sipil Suriah. Kedatangan para warga Suriah di tahun 2011 disambut dengan “*Open Door Policy*” oleh Turki. Turki menyediakan tempat mereka untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, keadaan di perbatasan Turki dan Suriah masih belum aman.

Para warga Suriah yang masih belum berada di Turki sebenarnya mengalami penderitaan karena masih hidup dalam tenda yang kondisinya tidak layak. Tenda yang mudah roboh jika terkena angin yang agak kencang. Makanan yang mereka makan juga membuat mereka sakit diare.

Kebanyakan adalah makanan yang mereka persiapkan sendiri ketika mau menyeberang ke negara lain (EDT, Iraq/Turkey: Open Borders to All Syrian Refugees, 2012).

Di lain pihak, Turki juga menerapkan kehati-hatian setelah sebelumnya banyak penyerangan Suriah yang melebar ke perbatasan Turki. Pada bulan Februari 2012 sebuah bom menewaskan 17 orang Turki di perbatasan Cilvegozu. Pada bulan Mei 2012, dua bom mobil meledak di pusat kota Reyhanli, dan berjarak hanya 5 km dari perbatasan Cilvegozu persimpangan dengan Suriah, meninggalkan 46 orang tewas dan lebih dari 100 luka-luka. Pada bulan Juni 2012, sebuah jet tempur Turki ditembak jatuh oleh tentara rezim Suriah di Mediterania, dekat perbatasan kedua negara. Dan pada akhir September 2014, tiga orang Turki terluka ketika tembakan mortir mendarat di Suruç di provinsi Şanlıurfa, sebagai Negara Islam (IS) pejuang bentrok dengan pasukan Kurdi di sisi lain perbatasan (Ahmadoun, 2014).

Pada awal 2012, pemerintah Turki yang bekerjasama dengan LSM Turki yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan dalam Suriah menciptakan sebuah sistem yang dikenal sebagai “titik nol pengiriman”. Metode ini diciptakan untuk menghindari pelanggaran kedaulatan nasional Suriah. Mekanismenya dengan cara memberikan

pengiriman bantuan ke perbatasan di tempat dimana para pengungsi dijemput oleh para relawan kemanusiaan Suriah (dari dewan lokal atau LSM). Para pengungsi dibawa ke kamp-kamp perbatasan dalam Suriah, terutama di kamp Atmeh. Pendekatan ini juga berusaha untuk mengurangi masuknya pengungsi ke Turki.

Tetapi, tak hanya pengungsi yang dihadapi Turki di daerah perbatasan Turk-Suriah. Pada bulan November 2012, Turki harus menjaga lebih ketat daerah perbatasan ketika tentara rezim Suriah membom daerah kamp Atmeh. Ini disebabkan kelompok radikal yang mengambil kontrol atas perbatasan, sehingga meningkatkan risiko penculikan pekerja bantuan (Ahmadoun, 2014).

Dengan adanya Uni Eropa ikut menjaga perbatasan wilayah Turki, Turki akan terbantu dalam penanganan konflik di wilayah perbatasan. Uni Eropa yang akan membantu dalam hal penjagaan pengungsi dan perdamaian akan sedikit membantu Turki menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai.

Kesimpulan

Alasan mengapa Turki sepakat dengan kerja sama dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran bisa dibuktikan dengan Model Aktor Rasional milik Graham T. Allison. Graham menerangkan bahwa

kebijakan luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan luar negeri adalah optimalisasi hasil dari kalkulasi untung-rugi yang diperoleh Turki dengan adanya kesepakatan tersebut.

Alasan yang pertama adalah mengenai peluang Turki untuk dinegosiasikan lebih lanjut sebagai calon anggota Uni Eropa. Seperti yang kita tahu sudah sekitar 30 tahun Turki menantikan kepastian untuk menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa yang ikut menjanjikan hal ini ke dalam butir perjanjian tentu saja menarik Turki untuk benar-benar menyepakati perjanjian tersebut. Uni Eropa menjanjikan untuk membuka chapter 33 pada *Copenhagen Criteria*. Ahmet Davutoglu Perdana Menteri Turki menyambut baik kerja sama ini

Alasan yang kedua adalah keuntungan ekonomi pada janji akses visa Schengen untuk warga negara Turki. Warga negara Turki sudah mengalami kesulitan untuk mengurus visa Schengen sejak lama. Visa Schengen yang mudah diakses oleh negara Eropa non Uni Eropa tidak dirasakan oleh Turki yang sudah dekat dan juga negara yang menjadi mitra bisnisnya. Berbicara mengenai ekonomi, tentu saja adanya visa Schengen ini berengaruh pada

ekonomi Turki. Data menunjukkan bahwa ekspor dan investasi Turki terbanyak berada di negara-negara Uni Eropa. Dengan adanya visa Schengen yang nantinya dipenuhi, maka semakin banyak investasi maupun kegiatan bisnis yang bisa dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan pebisnis. Ini akan memberi manfaat kepada kondisi ekonomi Turki berkaitan dengan kemakmuran negara Turki.

Alasan yang ketiga yakni Uni Eropa yang akan membantu Turki dalam menjaga perdamaian dan pengungsi di perbatasan Suriah dan Turki. Keadaan perbatasan yang memilukan di perbatasan Turki-Suriah pada 2012 adalah banyaknya pengungsi yang masih terlantar dan berada di kamp-kamp yang masih rentan terhadap kerusakan. Tenda yang mudah roboh terhadap angin ataupun makanan yang tidak layak. Ditambah lagi ancaman bahwa bom dan konflik bisa melebar ke wilayah Turki dan membahayakan bagi pengungsi maupun warga Turki. Turki sudah menerapkan sebuah sistem yang dikenal sebagai “titik nol pengiriman”. Sistem ini adalah pengiriman bantuan kepada para pengungsi di perbatasan. Walaupun begitu, ini tak akan bisa menghindarkan Turki dari ancaman konflik yang melebar. Maka dari itu, kalau Uni Eropa ikut andil dalam penjagaan perbatasan Turki-Suriah, ini akan

meringankan beban Turki dalam penanganan pengungsi.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka keputusan Turki sepakat dalam penanganan imigran dengan Uni Eropa dirasa rasional. Model aktor rasional Graham T. Allison membuktikan bahwa keputusan yang dibuat Turki rasional. Jadi, mengapa Turki lebih bekerja sama dengan Uni Eropa, tentu saja Turki sebenarnya masih ingin menjadi anggota Uni Eropa.

[Notes]

[1] Foreign Policy of the Turkish Republic. (2011). *CIDOB International Yearbook*.

[2] *Uni Eropa dan Turki teken kesepakatan bendung imigran*. (2015, November 30). Retrieved April 1, 2016, from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151129_dunia_turki_unieropa

[3] *Chronology of Turkey – European Union Relatios (1959-2015)*. (2015). Retrieved from www.ab.gov.tr/files/chronology.pdf

[4] *Rencana aksi Uni Eropa soal pengungsi dipertanyakan*. (2015, Agustus 27). Retrieved November 8, 2016, from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150827_dunia_eu_krisis

[5] *Dunia*. (2016, February 16). Retrieved April 1, 2016, from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160206_dunia_suriah_aleppo_pengungsi_turki

[6] *JOINT PRESS STATEMENT: "Turkey - EU High Level Energy Dialogue" Meeting*. (2016, Januari 29). Retrieved November 25, 2016, from European Union Website:

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/arias-canete/announcements/joint-press-statement-turkey-eu-high-level-energy-dialogue-meeting_es

[7] Ahmadoun, S. (2014). Turkey's Policy toward Syrian Refugees. *SWO Comments*.

[8] Al-Arian, A. (2014, April 24). *Syrian refugees cling to stability in Iraq*. Retrieved Desember 2, 2016, from Al-Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/syrian-refugees-cling-safety-iraq-201448102353645313.html>

[9] Armandhanu, D. (2015, September 3). *Turki Tidak Akan Tolak Pengungsi Asal Suriah*. Retrieved Maret 30, 2016, from CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150903111941-134-76372/turki-tidak-akan-tolak-pengungsi-asal-suriah/>

[10] *Chapters of the acquis*. (n.d.). Retrieved Desember 2, 2016, from European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations: http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en

[11] Grisgraber, D. (2014). *TOUGH TIMES FOR SYRIAN REFUGEES IN EGYPT*. Washington: Refugees International.

[12] Mas'ood, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3S Indonesia.

[13] Nugraha, D. (2015, September 6). *Perang di Suriah dan Kisah Para Pengungsi*. Retrieved

Oktober 25, 2016, from dipanugraha.org:
<https://dipanugraha.org/2015/09/06/perang-di-suriyah-dan-kisah-para-pengungsi/>

[14] *Policy of Zero Problems with our Neighbors*. (n.d.). Retrieved Desember 2, 2016, from Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs:
<http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa>

[15] Relations, F. A. (2016, Maret 18). *EU-Turkey statement, 18 March 2016*. Retrieved November 29, 2016, from Council of the European Union:
<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/>